

ABSTRAK

Latar belakang: Keberhasilan program Keluarga Berencana tidak hanya diukur dari peningkatan peserta program, tetapi juga efektivitas dan durasi pemakaian kontrasepsi. Tingkat putus pakai kontrasepsi modern masih cukup tinggi di Indonesia. Peran tipe fasilitas pelayanan dalam penyediaan alat kontrasepsi di era JKN diduga mempengaruhi diskontinuitas penggunaan kontrasepsi.

Tujuan: Mengetahui pengaruh tipe fasilitas pelayanan KB di era JKN terhadap diskontinuitas penggunaan kontrasepsi modern pada wanita usia subur di Indonesia.

Metode: Studi *cross-sectional* menggunakan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 dengan melibatkan 49.627 WUS usia 15-49 tahun. Setelah memperhitungkan kriteria inklusi dan eksklusi, yaitu tercatat dalam kalender dan menggunakan kontrasepsi modern pada tahun 2016-2017, didapatkan sampel berjumlah 5.871. Analisis data dilakukan menggunakan tes *chi-square* dan regresi logistik.

Hasil: Tingkat pendidikan dan status ekonomi menunjukkan peluang yang lebih besar untuk mengalami diskontinuitas secara berturut-turut dengan OR 2,11 (95% CI 1,62-2,74) dan OR 1,87 (95% CI 1,45-2,40). Kemudian pada aspek sistem, kemungkinan paling besar untuk mengalami diskontinuitas adalah mereka yang tidak memiliki asuransi dengan OR 2,70 (95% CI 1,34-4,82) serta tidak mendapatkan *informed choice* secara lengkap dengan OR 1,30 (95% CI 1,07-1,57). Setelah dilakukan analisis multivariabel, tipe fasilitas pelayanan lain (warung, apotek dan lainnya) serta FKTP memiliki risiko diskontinuitas kontrasepsi modern lebih besar, yaitu sebesar OR 3,88 (95% CI 2,13-7,07) dan OR 3,51 (95% CI 1,98-6,21).

Kesimpulan: Tingkat diskontinuitas penggunaan kontrasepsi modern lebih rendah pada WUS yang menggunakan fasilitas FKRTL. Faktor lain yang mempengaruhi diskontinuitas kontrasepsi adalah wilayah tempat tinggal, usia, jenis metode kontrasepsi serta paritas.

Kata kunci: diskontinuitas kontrasepsi modern, fasilitas pelayanan, survei demografi kesehatan, Indonesia

ABSTRACT

Background: The success of Family Planning program is not only measured by the increase of the program participants, but also by the contraceptive use effectiveness and duration. The contraceptive discontinuation rate of modern contraceptive is quite high in Indonesia. The role of service facility types in contraception supply in JKN (National Health Insurance) era is suspected to affect the discontinuity of contraceptive use.

Purpose: Discovering the impact of Family Planning facility types in JKN era towards the discontinuity of the modern contraceptive use of the women of childbearing age in Indonesia.

Method: Cross-sectional study using Indonesia Demographic and Health Survey 2017, involving 49,627 women of childbearing age between 15-49 year old. After considering the inclusion and exclusion criteria, which was recorded in the calendar, using modern contraceptive between 2016-2017, 5,871 women were collected. Data analysis was conducted, using chi-square test and the logistic regression.

Result: A high education and economic status has a bigger chance to run into a successive discontinuity with OR 2.11 (95% CI 1.62-2.74) and OR 1.87 (95% CI 1.45-2.40). While in the system aspect, the biggest possibility of discontinuity happens to those who do not have insurance OR 2.70 (95% CI 1.34-4.82) and do not fully get the *informed choice* OR 1.30 (95% CI 1.07-1.57). After conducting multivariable analysis the other service and FKTP service has modern contraceptive discontinuity risk as big as OR 3.88 (95% CI 2.13-7.07) and OR 3.51 (95% CI 1.98-6.21) the result is statistically significant. The type of contraceptive method also affects the discontinuity.

Conclusion: Obtaining Family Planning service of FKRTL gives a chance to the continuity of modern contraceptive use in a higher rate. The discontinuity rate of modern contraceptive use is significantly affected by age, domicile, type of contraceptive method and number of children born.

Keywords: Type of health care facility, family planning service, discontinuation of modern contraceptive, Indonesia DHS 2017.